

ABSTRAK

Habibi: 22161033: Implikasi calon tunggal kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Ketatanegaraan (Study atas UU No 10 tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/puu/xiii/2015

Pemilihan Umum adalah, kegiatan warga Negara, yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dalam kegiatan ini KPU sebagai lembaga penyelenggara mempersiapkan segala kebutuhan untuk berjalannya pemilihan, regulasi UU yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah sudah terjadi beberapa perubahan, pada UU sebelumnya tidak mengatur, tidak mempersilahkan calon tunggal/perseorangan ikut dalam konstestasi pilkada, dengan munculnya fenomena calon tunggal maka Mahkamah Konstitusi membuat sebuah alternative dengan mengeluarkan putusan untuk dipersilangkannya calon tunggal, uniknya salasatu tugas peran dan fungsi partai politik adalah edukasi politik, kaderisasi, lembaga yang kompetitif dalam pilkada, tidak mau mencalonkan dari kader-kader terbaiknya, padahal jumlah partai saat ini dikabupaten Tasikmalaya sudah mencapai 17 partai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi calon tunggal kepala daerah kabupaten Tasikmalaya terhadap partai politik dan lainnya, dan apa saja faktor penyebab terjadinya muncul calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah,

Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, pemilihan (pemilu) merupakan instrumen penting untuk menegahwantahkan kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah merupakan pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Calon tunggal di beberapa daerah terutama dikabupaten tasikmalaya merupakan salasatu bentuk demokrasi empirik keadaan calon tunggal adalah secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi. hal ini dalam kaitannya calon tunggal tentu ada dampak atau konsekuensi yang dirasakan oleh partai politik, masyarakat, dan ketatanegaraan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiric karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan lapangan, adapun alat dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dan pengamatan observasi.

Partai memegang kendali sepenuhnya, Masyarakat tidak diberi pilihan, Parpol lah yang membuat kebijakan agar calon perseorangan sebagai alternatif susah muncul. Selanjutnya parpol bersekongkol mengusung hanya satu pasangan untuk kepentingan politik mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Menurut politisi dikabupaten Tasikmalaya sekaligus anggota legislatif dengan munculnya calon tunggal, secara normative tidak ada masalah karena MK sudah membuat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/XIII/2015 yang mengabulkan permohonan atas Effendi Ghazali, namun secara substansi demokrasi itu berdampak buruk dikawatirkan terhadap parpol-parpol, dan diuntungkan terhadap pasangan calon yang mempunyai modal besar untuk membayar elit-elit politik. demikian factor yang mempengaruhi munculnya calon tunggal, mahal biaya partai politik, beratnya sarat dukungan yang diatur dalam undang-undang dilegitif, mesin partai dalam memberikan kaderisasi tidak berjalan dengan baik.